

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era reformasi dan otonomi daerah telah memberi ruang dan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengembangkan dan mempertahankan kebudayaannya serta mengembangkan nilai-nilai budaya dan sejarah mereka masing-masing, semasa itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menyediakan mekanisme bagi pemangku kedaulatan rakyat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki beranekaragam tradisi dan suku, dimana mereka memiliki latar belakang cagar budaya yang berbeda-beda, Keanekaragaman adat istiadat dari masing-masing. Kerajaan kecil Sanrobone yang berada di Kabupaten Takalar juga mempunyai corak kebudayaan serta warisan yang beranekaragam dari tiap kerajaan yang mendiami di Kabupaten Takalar.

Nilai-nilai Budaya Lokal Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Budaya lahir dan dikembangkan oleh manusia, melalui akal dan pikiran, kebiasaan dan tradisi. Setiap manusia memiliki kebudayaan tersendiri, bahkan budaya diklaim sebagai hak paten manusia. Kebudayaan merupakan hasil belajar yang sangat bergantung pada pengembangan kemampuan manusia yang unik yang memanfaatkan simbol, tanda-tanda, atau isyarat yang tidak ada

paksaan atau hubungan alamiah dengan hal-hal yang mereka pertahankan. Dengan demikian, setiap manusia baik individu atau kelompok dapat mengembangkan kebudayaan sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa masing-masing. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari binteraksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat

diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut. Fungsi Lembaga Adat Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan,

melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya, Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.

Pembinaan Lembaga Adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai , melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional. Pembiayaan Lembaga Adat disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, Berta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Koentjaraningrat (2000:181) Kebudayaan berasal dari bahasa Sansakerta, Budhayah, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Maka budaya dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Ada pendapat lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi-daya yang berarti daya dari budi.

Dalam hal ini, Prof. Dr. Koentjoroningrat (2003:74) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak perlu dibiasakan dengan belajar, seperti tindakan naluri, refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan apabila ia sedang membabi buta. Bahkan tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa oleh makhluk manusia dalam

gennya bersamanya (seperti makan, minum, atau berjalan), juga dirombak olehnya menjadi tindakan yang berkebudayaan.

E.B. Taylor (1871) Memberikan definisi bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hokum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berfikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu, akan sangat tertarik oleh obyek-obyek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya. Seorang sosiolog mau tidak mau tidak mau harus menaruh perhatian pada perilaku social, yaitu pola-pola perilaku

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara budaya dan kebudayaan adalah bahwa budaya itu merupakan cipta, rasa dan karsa suatu masyarakat, sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa dan karsa masyarakat tersebut. Sudah jelas dan pasti bahwa budaya atau kebudayaan itu memiliki sejarah sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Budaya dan kebudayaan merupakan salah satu ruang lingkup sejarah. Tanpa ada

sejarah budaya atau kebudayaan, maka kita tidak akan tahu asal atau awal mula muncul dan perkembangannya. Misalnya saja, sejarah budaya Hindu dan Budha di Indonesia atau sejarah budaya Islam di Indonesia. Dengan melihat atau membaca sejarah, maka kita jadi tahu bagaimana sebuah kebudayaan Hindhu-Budha, Islam, Kristen dll berkembang di Indonesia. Jadi sejarah dan budaya atau kebudayaan itu sangat berkaitan dan penting untuk dipelajari agar kita tahu mana yang benar-benar budaya asli bangsa Indonesia, dan mana yang campuran (akulturasi/asimilasi). Begitupun juga dengan sejarah budaya atau kebudayaan bangsa lain, tak ada salahnya untuk kita baca sejarahnya.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa pada mulanya lembaga adat di Sanrobone Kabupaten Takalar dipelopori oleh orang-orang yang bermukim di sekitar Benteng Sanrobone yang merupakan keturunan dari karaeng atau raja Sanrobone sebelumnya, kemudian dikembangkan oleh anak cucu mereka hingga sekarang. Sebelum membentuk lembaga adat maka tokoh masyarakat dikumpulkan untuk diadakannya musyawarah dan mufakat. Adapun pembentukan lembaga adat ini lahir dari atas kegelisahaan para masyarakat setempat berhubung sudah banyaknya pengaruh dari luar atau kebudayaan asing yang sewaktu-waktu bisa mengancam budaya masyarakat setempat. usaha pembentukan lembaga adat ini berjalan sukses dan semua elemen masyarakat terlibat. Dulu daerah sanrobone merupakan wilayah kerajaan, bagi masyarakat yang bermukim dikabupaten takalar dan sekitarnya mendengar

kata sanrobone pasti dipikirkan mereka sudah terlintas dengan sejarahnya dan adat istiadatnya, sanrobone dari dulu sampai sekarang dikenal dengan hal-hal mistisnya juga, tapi seiring berjalannya waktu hal tersebut sudah mulai terkikis juga yang karena dipengaruhi oleh modernisasi. Itulah mengapa lembaga adat mengupayakan agar generasi muda setidaknya bisa mengenal adat istiadatnya dan bisa mengaplikasikannya karna secara tidak langsung itu sudah menjadi bagian dari melestarikan kebudayaan.

Maka peneliti untuk mencapai maksud tersebut membuat rencana dengan agenda *tahap pertama*, Persiapan penelitian meliputi Penyusunan proposal, konsultasi dengan pembimbing akademik, pengajuan proposal untuk diseminarkan dan perbaikan, pengurusan izin penelitian, dan Penyusunan instrumen penelitian. *Tahap kedua*, mengadakan pertemuan dengan *stakeholder* di lokasi penelitian, meliputi Melapor ke pemerintah terkait dan setempat, Mengadakan konsultasi pembahasan rencana penelitian dengan pemerintah desa setempat, Mengadakan Konsultasi dengan anggota lembaga adat terkait perannya dalam melestarikan kebudayaannya. *Tahap ketiga*, melakukan sosialisasi ke masyarakat, meliputi Mengumpulkan data, Mengadakan verifikasi data, mengadakan koordinasi dengan stakeholder eksternal dalam hal ini ketua kelompok lembaga adat. *Tahap keempat*, pelaksanaan meliputi Membuat daftar populasi dan sampel penelitian. *Tahap kelima*, pemantauan meliputi mengumpulkan laporan hasil penelitian, Memantau langsung lokasi dan dokumentasi. *Tahap keenam*, Tindak lanjut

meliputi rekomendasi hasil penelitian difungsikan sebagai evaluasi secara bertahap untuk tahap jangka tertentu bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan, sehingga dari latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Adapun istilah dan susunan struktural yang terdapat dalam lembaga adat sanrobone ialah sebagai berikut :

1. Karaeng

Karaeng disini ialah sebagai tokoh utama dalam lembaga ini, seorang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan terhadap kerajaan sanrobone.

2. Anrong Guru

Anrong Guru secara struktur berada langsung dibawa karaeng atau kata lainnya sebagai asisten karaeng.

3. Gallarang

Gallarang disini ditugaskan untuk bertanggung setiap wilayah kerajaan yang di amanahkannya. Ketujuh gallarang tersebut ialah :

- a. Gallarang Paddinging
- b. Gallarang Tonasa
- c. Gallarang Banyuanyara
- d. Gallarang Pa'rasangan Beru
- e. Gallarang Parappa
- f. Gallarang Jene
- g. Gallarang Lau

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dengan Judul “ **Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Kelestarian Budaya (Studi Kasus Lembaga Adat Sanrobone Kabupaten Takalar)**”.

B. Rumusan Masalah

Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran lembaga adat Sanrobone dalam mempertahankan kelestarian Budaya di Kabupaten Takalar ?
2. Apa faktor penghambat lembaga adat Sanrobone dalam mempertahankan Budaya di Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang mendasari rumusan pokok permasalahan tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat Sanrobone dalam mempertahankan kelestarian budaya di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi lembaga adat Sanrobone dalam mempertahankan budaya di Kabupaten Takalar.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan pengembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya dan pengetahuan terutama yang yang berkaitan dengan peran lembaga adat dalam mempertahankan kelestarian budaya khususnya lembaga adat sanrobone kabupaten takalar.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Almamater, bahwa hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi bahan bacaan hasil penelitian di bidang penerapan ilmu terapan sosial budaya.
- b. Bagi pemerhati budaya dan lembaga adat terkait, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi *stakeholder* dalam peningkatan dan pengembangan pelestarian kebudayaan di kabupaten Takalar.
- c. Bagi peneliti, bahwa dengan adanya penelitian ini adalah penelitian dapat mengetahui kultur daerah setempat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Yang Relevan

Dalam Journal “Acta Diurna” Volume III. No.4. Tahun 2014 disini seorang peneliti yang bernama Christeward Alus dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat” tujuan penelitiannya disini adalah mengkaji bagaimana peranan lembaga adat untuk membangkitkan pemahaman masyarakat Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi makan bersama merupakan suatu tradisi yang memiliki nilai-nilai yang positif bagi pembentukan karakter masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian masyarakat desa Balisoan, untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik angket atau kuisisioner dan observasi langsung sebagai teknik pokok sedangkan teknik penunjangnya adalah teknik wawancara sebagai pelengkap dalam mencari data yang diperlukan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut sudah jelas sangat berbeda, dari hal yang paling mendasar yaitu yang diteliti adalah bagaimana peran

lembaga adat untuk membangkitkan pemahaman masyarakat sahu tentang sukunya, mulai awal mulanya suku sahu tersebut ada dan apa saja perbedaan suku sahu dengan suku lainnya. Hanya saja relevan karena yang diukur adalah objek penelitian yaitu bagaimana peran lembaganya .

Penelitian dilakukan oleh Rhony Andrhes Linthin, bagian hokum keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitiannya “ Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 2015”. Penelitian ini dilangsungkan di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang dikhususkan pada Lembang Palipu. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu pemangku adat Tongkonan Layuk Biang, Kepala Lembang Palipu, masyarakat Lembang Palipu yang menggadaikan tanahnya, serta masyarakat Lembang Palipu yang bersengketa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tata cara gadai tanah pertanian pada masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu dilaksanakan dalam bentuk lisan dan tanpa batas waktu yang dalam pelaksanaannya wajib disaksikan oleh *To' Parenge'* Tongkonan Layuk Biang karena gadai tanah pertanian merupakan perjanjian adat. Dalam

proses pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu melalui tiga tahapan penting, yaitu : *dimisararai*, *melambi*, dan *masulang*. (2) Peran Lembaga Adat Tongkonan dalam proses penyelesaian sengketa gadai dipercaya oleh masyarakat adat Toraja di Lembang Palipu karena sifat dasar dari gadai ialah kekeluargaan (*sangsiuluran*) sehingga proses penyelesaian sengketa gadai juga diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan dan aturan hukum adat.

Letak relevansi dari dari judul penelitian yang saya angkat dengan kedua penelitian diatas sebelumnya ialah dimana peran lembaga adat masing-masing menjalankan fungsinya diwilayah kelembagaannya atau kekuasaannya, lembaga adat disini bukan cuman sekedar organisasi terstruktur yang mempunyai peran tanpa mengaplikasikannya, akan tetapi lembaga adat tersebut menjalankan apa yang sudah menjadi peran dan fungsinya. Fungsi peran lembaga adat pun bukan cuman untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang telah ada, akan tetapi dia mencakup juga mengenai hukum, ekonomi, dan kehidupan social masyarakat banyak.

B. Pengertian Peran

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan. (Wolfman, 1992:10).

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait berdasarkan kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan yang ia miliki. Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) Peran adalah

konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat”.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status. Sedangkan Istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor aktor profesional. Maurice Cuverger, (2010: 103).

Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, (2007: 50) mengatakan bahwa “Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”. Sedangkan Soerjono Soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan sttus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012 : 94)

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa peran adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sebagai wujud dari suatu kedudukan (*status*) untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

C. Lembaga Adat

Lembaga Adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat

istiadat dan hukum adat yang berlaku. Menurut Yesmil Anwar dan Adang (2013:204) menjelaskan bahwa, Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga social berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani, mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama. Sementara menurut Soerjono Soekanto dalam Yesmil dan Adang (2013:205), Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain: Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan, menjaga ketuhanan dari masyarakat yang bersangkutan, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), yaitu system pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari

gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi social yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut. Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga social yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat. lembaga adat juga lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah

dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Adapun fungsi Lembaga ialah sebagai berikut :

Berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Berfungsi sebagai alat control keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain: Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Wewenang Lembaga Adat Lembaga adat, Lembaga Adat memiliki wewenang yang meliputi : Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut, mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat, sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan pada tingkat desa, dan membantu

penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/ kota desa adat tersebut berada.

Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat, Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu : Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.

Kemudian Pembinaan Lembaga Adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai , melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan

Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional. Pembiayaan Lembaga Adat Dana pembinaan terhadap Lembaga Adat pada semua tingkatan, disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, Berta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

D. Pengertian Budaya dan Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-

unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. "Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits (187:2000) dan Bronislaw Malinowski (187:2000) mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial,

ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward Burnett Tylor (188:2000), kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (189:2000), kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, maka penulis menyimpulkan pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Unsur-Unsur Kebudayaan, Koentjaraningrat (1985) menyebutkan ada tujuh unsur-unsur kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi pokok kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut adalah : Sistem

teknologi dan peralatan, sistem organisasi masyarakat, sistem Bahasa, sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, sistem pengetahuan, sistem religi, dan sistem Kesenian.

Pada jaman modern seperti ini budaya asli negara kita memang sudah mulai memudar, faktor dari budaya luar memang sangat mempengaruhi pertumbuhan kehidupan di negara kita ini. Contohnya saja anak muda jaman sekarang, mereka sangat antusias dan *up to date* untuk mengetahui juga mengikuti perkembangan kehidupan budaya luar negeri. Oleh karena itu bukan hanya orang-orang tua saja yang harus mengenalkan dan melestarikan kebudayaan asli negara kita tetapi juga para anak muda harus senang dan mencintai kebudayaan asli negara sendiri. Banyak faktor juga yang menjelaskan soal 7 unsur budaya universal yaitu : Sistem teknologi dan peralatan sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang – barang dan sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Sistem organisasi masyarakat sistem yang muncul karena kesadaran manusia bahwa meskipun diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna namun tetap memiliki kelemahan dan kelebihan masing – masing antar individu sehingga timbul rasa utuk berorganisasi dan bersatu. Bahasa, sesuatu yang berawal dari hanya sebuah kode, tulisan hingga berubah sebagai lisan untuk mempermudah komunikasi antar sesama manusia. Bahkan sudah ada bahasa yang dijadikan bahasa universal seperti bahasa Inggris. Sistem mata pencaharian hidup dan

sistem ekonomi sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang – barang dan sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Sistem pengetahuan, sistem yang terlahir karena setiap manusia memiliki akal dan pikiran yang berbeda sehingga memunculkan dan mendapatkan sesuatu yang berbeda pula, sehingga perlu disampaikan agar yang lain juga mengerti. Sistem religi, Kepercayaan manusia terhadap adanya Sang Maha Pencipta yang muncul karena kesadaran bahwa ada zat yang lebih dan Maha Kuasa. Kesenian. Setelah memenuhi kebutuhan fisik manusia juga memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan psikis mereka sehingga lahirlah kesenian yang dapat memuaskan.

Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan (Wujud Ideal), wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Aktivitas (Tindakan), aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem

sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Artefak (Karya), artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

Faktor Yang Mendorong Dan Menghambat Perubahan Kebudayaan ialah adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi mudah berubah, terutama unsur-unsur teknologi dan ekonomi. Adanya individu-individu yang mudah menerima unsur-unsur perubahan kebudayaan. Ada beberapa factor yang mendorong terjadinya perubahan kebudayaan, yakni factor internal yaitu sebagai berikut : Perubahan Demografis, perubahan demografis disuatu daerah biasanya cenderung terus bertambah, akan mengakibatkan terjadinya perubahan diberbagai sektor kehidupan, contohnya : bidang perekonomian, penambahan penduduk akan persediaan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Konflik Social, konflik sosial dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat, contohnya : konflik kepentingan antara kaum pendatang dengan penduduk setempat didaerah transmigrasi, untuk

mengatasinya pemerintah mengikut sertakan penduduk setempat dalam program pembangunan bersama-sama para transmigran. Bencana alam, bencana alam yang menimpa masyarakat dapat mempengaruhi perubahan contohnya : banjir, bencana longsor, letusan gunung berapi masyarakat akan dievakuasi dan dipindahkan ketempat yang baru, disanalah mereka harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan budaya setempat sehingga terjadi proses asimiliasi maupun akulturasi. Perubahan Lingkungan Alam Ada beberapa faktor misalnya pendangkalan muara sungai yang membentuk delta, rusaknya hutan karena erosi, perubahan demikian dapat mengubah kebudayaan hal ini disebabkan karena kebudayaan mempunyai daya adaptasi dengan lingkungan setempat. Adapun faktor eksternal ialah sebagai berikut :

Perdagangan, indonesia terletak pada jalur perdagangan asia timur dengan india, timur tengah bahkan eropa barat, itulah sebabnya indonesia sebagai persinggahan pedagang pedagang besar, selain berdagang mereka juga memperkenalkan budaya mereka pada masyarakat setempat sehingga terjadilah perubahan budaya. Penyebaran Agama masuknya unsur-unsur agama hindu dari india atau budaya arab bersamaan proses penyebaran agama hindu dan islam ke indonesia demikian pula masuknya unsur-unsur budaya barat melalui proses penyebaran agama kristen dan kolonialisme. Peperangan, kedatangan bangsa barat ke indonesia umumnya menimbulkan perlawanan keras dalam bentuk peperangan, dalam suasana tersebut ikut masuk pula unsur unsur budaya bangsa asing ke indonesia.

Hubungan timbal balik antara kebudayaan dengan masyarakat, Sebagaimana ada hubungan antara kebudayaan, peradaban dan sejarah. *Masyarakat itu menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu menentukan corak masyarakat.* Jadi antara manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak mungkin keduanya dipisahkan pada manusia (dalam arti luas, masyarakat), maka ada kebudayaan, tidak akan ada kebudayaan kalau tidak ada pendukungnya, yaitu manusia. Akan tetapi manusia itu hidupnya tidak berapa lama, karena semua pasti akan menemui ajal. Maka untuk melangsungkan atau melestarikan kebudayaan, pendukungnya harus merupakan kesinambungan dari satu keturunan ke keturunan lainnya.

E. Teori Yang Relevan

Dalam penelitian ini saya sebagai penulis mengangkat beberapa teori yang dianggap relevan sesuai dengan judul penelitian, ialah sebagai berikut :

Teori Struktural Fungsional. Ritzer (2009: 21) konsep utama dalam teori ini adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori ini masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan mempengaruhi akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional

terhadap yang lain. Sebaliknya, jika tidak fungsional maka struktur tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.

Lembaga adat yang erat kaitannya dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan masyarakat ialah diatur dalam adat istiadat, sehingga bimbingan yang paling banyak diterima oleh masyarakat adalah dalam lembaga adat. Lembaga adat yang merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan mempunyai fungsi pengawasan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi terhadap anggota-anggotanya.

Sebagaimana para penganut teori struktural fungsional melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa sehat atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya (kelompok/individu fungsional) memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagiannya yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam, atau sakit. Demikian halnya juga dalam Lembaga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga yang saling berhubungan

satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Bahwa pada umumnya, Lembaga terdiri dari Ketua, wakil ketua dan anggota dimana masing-masing anggota tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar anggota.

Disamping fungsional, Robert K.Merton dalam Ritzer (2009: 22) juga mengajukan konsep disfungsi dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat bersifat negatif. Masih terhubung dengan contoh di atas, bahwa seorang ketua bisa disfungsi terhadap anggota-anggotanya. Dimana ketua tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan yang mengatur dan mengarahkan. Jika hal tersebut terjadi dalam suatu lembaga maka akan mengganggu sistem yang ada dalam lembaga, membuat fungsi lembaga mengalami pergeseran.

Teori Konflik, tidak dapat dipungkiri dalam suatu lembaga adat tidak selamanya akan berada dalam keadaan yang statis atau dalam kondisi yang seimbang (*equilibrium*), namun juga mengalami kegoncangan di dalamnya. Menurut teori konflik masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya (Ritzer, 2009:26). Pertentangan (konflik) bisa terjadi antara anggota-anggota itu sendiri, atukah antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Menurut teori konflik Dahrendrof mengatakan bahwa konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik

golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif (Ritzer, 2009:28).

Para penganut teori konflik mengakui bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan konflik. Berghe dalam Ritzer (2009:29) mengemukakan empat fungsi dari konflik sebagai berikut: Sebagai alat untuk memelihara solidaritas, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain, mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi, dan fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengakui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat. Misalnya dalam sebuah lembaga terjadi konflik atau pertentangan antara sesama anggota, (kemudian di luar lingkungan keluarganya mereka memiliki musuh yang sama. Maka mereka terintegrasi dalam melawan musuhnya tersebut dengan mengabaikan konflik internal antara mereka.

Teori Interaksionis Simbolik, menurut Herbert Blumer (1962) seorang tokoh modern dari Teori Interaksionisme Simbolik dalam Ritzer (2009:52) mengungkapkan bahwa istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada

sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, melainkan didasarkan pada “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antara individu diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam interaksionisme simbolik bahwa dalam proses interaksi individu dimulai dari suatu proses stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon oleh si aktor. Tetapi antara stimulus dan respon atau tanggapan diantarai oleh proses interpretasi. Proses interpretasi adalah proses berpikir yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki manusia.

Secara sederhana dapat digambarkan suatu proses interaksi yang terjadi dalam kelompok yang dimulai dengan adanya proses stimulus kemudian respon atau tanggapan. Dalam masyarakat dikenal simbol komunikasi. Ritzer (2009:55) mengemukakan simbol komunikasi merupakan proses dua arah di mana kedua pihak saling memberikan makna atau arti terhadap simbol-simbol itu. Dengan mempelajari simbol-simbol tersebut berarti manusia belajar melakukan tindakan secara bertahap. Dalam lembaga adat juga dikenal simbol komunikasi, sehingga antara anggota lembaga adat saling memahami dan mengerti tindakan anggota lainnya.

Contoh seorang karaeng memerintahkan atanya(bawahan) untuk

mengambilkan perlengkapan perang di dalam istana. Ata tersebut mendengarkan perintah Karaeng dan melaksanakan perintahnya dengan mengambilkan perlengkapan tersebut. Ini artinya Karaeng memberikan stimulus kemudian secara tidak langsung Ata menerima stimulus itu dan selanjutnya memberikan tanggapan atau respon atas stimulus dari Karaeng.

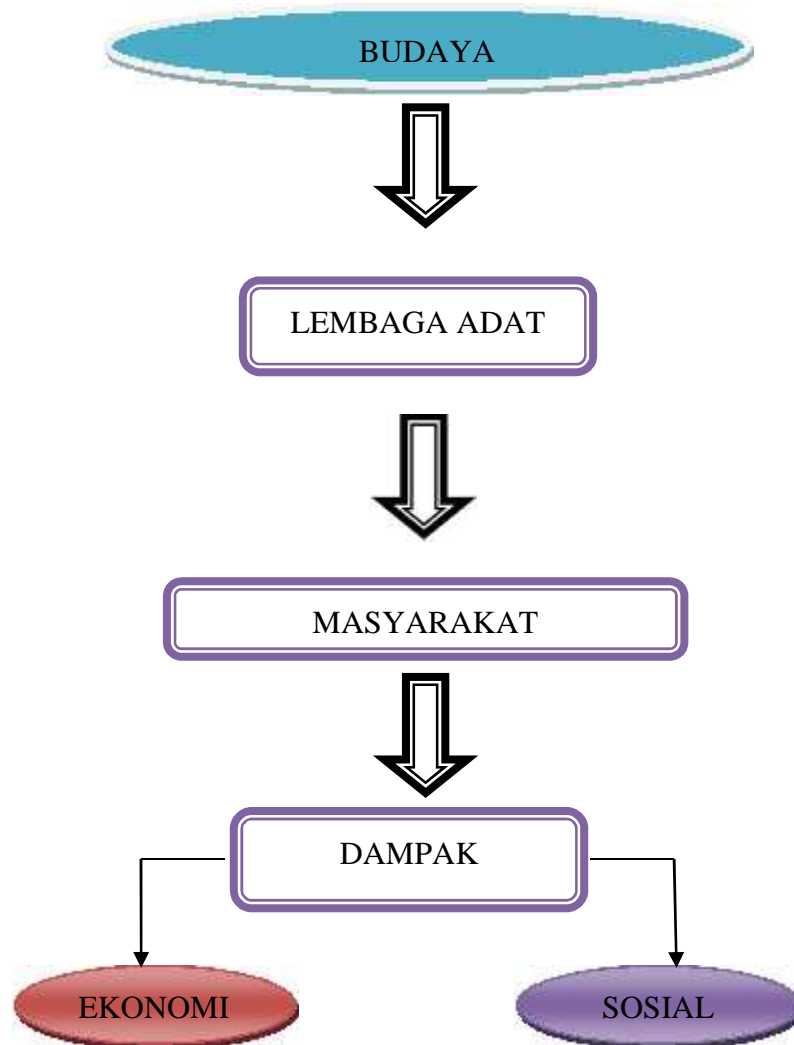
Dari pendekatan ketiga teori sosiologi yang dipaparkan di atas yakni teori struktural fungsionalis, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik terhadap lembaga keluarga, masing-masing sangat jelas mendiskripsikan proses sosial yang terjadi dalam keluarga. Bahwa dalam sebuah lembaga ada fungsi dan disfungsi yang terjadi antara anggota lembaga. Dalam suatu lembaga pun sering terjadi pertentangan (konflik) internal maupun eksternal anggota lembaga. Dan sebagai lembaga sosialisasi pertama dimana di dalamnya terdapat proses interaksi antara anggota sehingga ada kesepahaman dan tercipta keharmonisan dalam lembaga tersebut.

F. Kerangka Pikir

Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Menurut John Haba (2008:7-8) kearifan lokal merupakan bagian dari konstruksi budaya. Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan

merupakan elemen penting untuk memperkuat kohesi sosial di antara warga masyarakat. Secara umum, kearifan lokal memiliki ciri dan fungsi berikut ini: (1) sebagai penanda identitas sebuah komunitas; (2) sebagai elemen perekat kohesi sosial; (3) sebagai unsur budaya yang tumbuh dari bawah, eksis dan berkembang dalam masyarakat; bukan unsur budaya yang dipaksakan dari atas; (4) berfungsi memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas; (5) dapat mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground; (6) mampu mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi dan mekanisme bersama untuk mempertahankan diri dari kemungkinan terjadinya gangguan atau perusakan solidaritas kelompok sebagai komunitas yang utuh dan terintegrasi. Dari paparan di atas dapat dipahami, bahwa kearifan lokal adalah seluruh gagasan, nilai, pengetahuan, aktivitas, dan benda-benda budaya yang spesifik dan dibanggakan yang menjadi identitas dan jati diri suatu komunitas atau kelompok etnis tertentu. Masalahnya kearifan lokal tersebut seringkali diabaikan, dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang apalagi masa depan. Dampaknya adalah banyak warisan budaya yang lapuk dimakan usia, terlantar, terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya. Padahal banyak bangsa yang kurang kuat sejarahnya justru mencari-cari jatidirinya dari tinggalkan sejarah dan warisan budayanya yang sedikit jumlahnya. Kita sendiri, bangsa Indonesia, yang kaya dengan warisan budaya justru terkadang mengabaikan aset yang tidak ternilai tersebut. Sungguh kondisi yang

kontradiktif. Nurgiyantoro (1995: 164) menegaskan bahwa cerita dan tradisi bercerita sudah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini, jauh sebelum mereka mengenal tulisan. Cerita merupakan salah satu sarana penting untuk mempertahankan eksistensi diri. Cerita tidak saja digunakan untuk memahami dunia dan mengekspresikan gagasan, ide-ide, dan nilai-nilai, melainkan juga sebagai sarana penting untuk memahamkan dunia kepada orang lain, menyimpan, dan mewariskan gagasan dan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi berikutnya.

SKEMA KERANGKA PIKIR**Skema: kerangka pikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam studi penelitian banyak kita temui aneka ragam jenis penelitian, namun apabila dilihat dari cara pendekatannya, maka pendekatan yang penulis pakai disini yakni pendekatan Etnografi, dimana Etnografi sering digunakan untuk mendeskripsikan atau merekonstruksi dari gambaran dalam budaya dan kelompok. Proses penelitian etnografi dilaksanakan di lapangan, berbentuk observasi dan wawancara secara alamiah dengan partisipan. Menurut Nawawi dan Martini (1995), penulisan kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses menjangring informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penulis dalam hal ini berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan apa saja yang ada dilokasi penelitian. Penelitian ini dapat pula didefinisikan dengan metodologi atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan atau tulisan

dari obyek yang diteliti, yang diarahkan pada latar belakang individu yang holistik.

Penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang biasa disebut juga penelitian taksonomik, seperti telah disebutkan sebelumnya, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting* (Sugiyono, 2011). Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

B. Lokus Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yakni pada tahun 2017, di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Adapun subjek yang menjadi informan dalam penulisan ini yaitu lembaga adat (tokoh adat), tokoh

masyarakat dan tokoh pemuda. Dalam penentuan informan ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:300), “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.” Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah Lembaga adat dimana di dalamnya terdapat tokoh-tokoh adat dan masyarakat sanrobone.

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran lembaga adat. Oleh karena itu peneliti menentukan informan yang dianggap bisa memberikan informasi tentang persoalan yang dimaksud, dimana informan diambil dari tokoh lembaga adat dan aparatur Desa Sarobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Pada cara ini pertimbangan pengumpulan data yang didasarkan atas kesesuaian dengan tujuan dan maksud peneliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Yang menjadi instrumen utama (*key instrument*) dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, maka peneliti mulai tahap awal penelitian sampai pada hasil penelitian ini seluruhnya di lakukan oleh peneliti. Selain itu, untuk mendukung tercapainya hasil penelitian maka peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik wawancara terstruktur atau interview.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengambilan data dari dokumentasi yang ada di Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.

Sumber data merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan absahan data dan ketepatan data atau informasi yang diperoleh. Adapun jenis sumber data secara menyeluruh dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Responden

Jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya dikenal sebagai responden. Dalam penelitian ini yang menjadi responden terdiri dari beberapa informan yang meliputi: tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

b. Dokumen dan arsip

Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, di antaranya adalah deskripsi lokasi kecamatan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teknik, di antaranya:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dan di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat di bedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat, dan sebagainya. Wawancara memiliki sifat yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subyek sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan baik. Wawancara terbagi atas dua jenis

yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada subyek telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

Sugiyono (2011), wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara otomatis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dinyatakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen baik dokumen tertulis maupun hasil gambar.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dengan hal ini Nasution dalam Sugiyono (2011) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data terjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “ *grounded*”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersamaan

dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sistesi, menyusun, kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membentuk kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

I. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2011) triangulasi (pengujian) kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Teknik keabsahan data ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui dari beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu untuk pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HISTORS LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Pebruari 1960, proses pembentukannya melalui tahapan perjuangan yang panjang. Sebelumnya, Takalar sebagai Onder afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra Makassar bersama-sama dengan Onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jeneponto. Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa district) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar, dilakukan bersama antara Pemerintah, Politisi dan Tokoh-tokoh masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu:

- a. Melalui Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar. Perjuangan melalui Legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat)

orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan Abd. Mannan Dg. Liwang.

- b. Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H. Makkarang Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mamajja, H. Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tombong, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.

Upaya ini dilakukan tidak hanya sekali jalan. Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belum mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957) maka terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibukotanya Jeneponto. Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H. Mannyingarri Dg. Sarrang dan Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang sebagai ketua DPRD. Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 (dua) Kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar.

Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar, berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959), tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di

Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar termasuk didalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Pebruari 1960, Terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak H. Donggeng Dg. Ngasa seorang Pamongpraja Senior.

Selanjutnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai Ibukota Kabupaten Takalar. Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Pebruari 1960 sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar. Berdasarkan struktur pemerintahan pada waktu itu, Bupati Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dibantu oleh 4 (empat) orang Badan Pemerintahan Harian (BPH), dengan personalianya yaitu:

- BPH Tehnik & Keamanan : H. Mappa Dg. Temba
- BPH Keuangan : Bangsawan Dg. Lira
- BPH Pemerintahan : H. Makkaraeng Dg. Manjarungi
- BPH Ekonomi : Bostan Dg. Mamajja

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, Districk Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Districk Topejawa, Districk Takalar, Districk Laikang dan Districk Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA

(Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibukota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara). Sehingga dengan demikian sampai sekarang 2012 Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) buah Kecamatan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Kesembilan kecamatan ini membawahi sejumlah 76 desa dan 24 kelurahan, dengan jumlah penduduk 275.034 jiwa. Sejak terbentuknya Kabupaten Takalar hingga saat ini, pejabat Bupati Kepala Daerah silih berganti, demikian pula Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masing-masing yaitu:

Tabel 4.1 Daftar Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Takalar :

No	Bupati / Kepala Daerah	Masa Jabatan
1	Donggeng Dg. Ngasa	1960-1964
2	Makkatang Dg. Sibali	1965-1967
3	M. Suaib Pasang	1967-1978

4	Ibrahim Tulle	1968-1983
5	Batong Aminullah	1983-1987
6	Drs.H. Tadjuddin Nur	1987-1992
7	Drs.H. Syahrul Saharuddin	1992-1997
8	Drs.H. Zainal Abidin, M.Si	1997-2002
9	Drs.H. Ibrahim Rewa,MM	2002-2007
10	DR.H.Ibrahim Rewa,MM	2007-2012
11	DR.H.Burhanuddin Baharuddin,SE,M.Si	2012 – 2017

Tabel 4.2 Daftar Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) Kabupaten Takalar :

No	Wakil Bupati	Masa Jabatan
1	Drs.H. M. Said Pammusu, M.Si	1999-2002
2	Drs. A. Makmur A. Sadda, MM	2002-2007
3	Drs.A. Makmur A. Sadda	2007-2012
4	H.M. Natsir Ibrahim, MM	2012-2017

Tabel 4.3 Daftar Ketua DPRD Kabupaten Takalar :

No	Ketua DPRD	Masa Jabatan
1	H. A. Dahlang Dg. Sibali	1966-1970
2	Ashar Mangung	1970-1971

3	H. Halollang Adam, BA	1971-1977
4	Hasbuddin Muntu	1977-1982
5	H. ABD. Wahab Dg. Ngerang	1982-1987
6	H. Semming Benu	1987-1992
7	Drs. Sirajuddin Lopo	1992-1997
8	Tjardiman	1997-1999
9	Drs. H. Ibrahim Rewa, MM	1999-2002
10	Drs. H.Napsa Baso	2003-2009
11	Drs.H.Abd.Majid Makkarang, MM	2009-2014
12	H. Djabir Bonto	2014-2019

Demikianlah, sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Takalar dan perkembangannya.

2. Wilayah Administratif Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar berada antara 5.3 - 5.33 derajat Lintang Selatan dan antara 119.22-118.39 derajat Bujur Timur. Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattalasang terletak 29 km arah selatan dari Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km², dimana 240,88 km² diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km.

Dengan batas wilayah Kabupaten Takalar sebagai berikut :

- a. Bagian Utara Kabupaten Takalar berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
- b. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa.
- c. Bagian Selatan dibatasi oleh Laut Flores.
- d. Bagian Barat dibatasi oleh Selat Makassar.

Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan masing-masing :

1. Kecamatan Manggarabombang
2. Kecamatan Mappakasunggu
3. Kecamatan Polobangkeng Selatan
4. Kecamatan Polobangkeng Utara
5. Kecamatan Galesong Selatan
6. Kecamatan Galesong Utara
7. Kecamatan Pattalassang
8. Kecamatan Galesong
9. Kecamatan Sanrobone

Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, daratan dan perbukitan. Bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah

dengan kemiringan antara 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25, derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25, dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi pantai, batu gamping, terumbu dan tula serta beberapa tempat batuan lelehan basal.

Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasa terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret. Rata-rata curah hujan bulanan pada musim hujan berkisar antara 122,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah tertinggi rata-rata harian adalah 27,9 C (Oktober) dan terendah 26,5 C (Januari – Februari) temperatur udara terendah rata-rata 22,2 hingga 20,4 C padabulan Februari-Agustus dan tertinggi 30,5 hingga 33,9 C pada bulan September - Januari.

Berdasarkan letaknya geografisnya, Kabupaten Takalar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Kabupaten Takalar bagian Timur (meliputi wilayah Palombangkeng Utara dan Palombangkeng Selatan) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah bukit-bukit (Gunung Bawakaraeng). Wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan.
- b. Kabupaten Takalar bagian Tengah (wilayah Pattalassang;ibukota Takalar) merupakan dataran rendah dengan tanah relatif subur sehingga di wilayah

ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, perkebunan dan pertambakan.

- c. Kabupaten Takalar bagian Barat (meliputi Mangarabombang, Galesong Utara, Galesong Selatan, Galesong Kota, Mappakasunggu dan Sanrobone) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur untuk pertanian dan perkebunan, sebagian merupakan daerah pesisir pantai yang cocok untuk pertambakan dan perikanan laut. Potensi ikan terbang, telur ikan terbang, dan rumput laut di wilayah ini diduga cukup potensial untuk dikembangkan.

Potensi sumber daya alam Kabupaten Takalar meliputi perikanan laut, pertanian, perkebunan dan peternakan. Luas areal budidaya ikan pada tahun 2006 sekitar 4.856 ha, budidaya tambak dengan luas 4.343 ha yang tersebar di hampir setiap kecamatan. Produksi ikan laut di Kabupaten Takalar pada tahun 2006 mencapai 26.776 ton. Selain itu Kabupaten Takalar dikenal sebagai penghasil ikan terbang dan rumput laut. Dalam Program Gerbang Emas Kabupaten Takalar sangat potensial dijadikan sebagai pusat inkubator pengembangan rumput laut.

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Makassar. Dimana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara

ekonomis, jika Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Makassar. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis. Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal. Dengan fasilitas pelabuhan yang ada, Takalar memiliki potensi akses regional maupun nasional sebagai pintu masuk baru untuk kegiatan industri dan perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur setelah Makassar mengalami kejenuhan.

Demikian pula dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi darat, seperti; akses jalan menuju kota Makassar, jarak yang relatif tidak jauh dari pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, jalan beraspal dan sarana transportasi laut yang memadai berupa pelabuhan atau dermaga, Takalar siap menunjang aktivitas perdagangan dalam taraf internasional.

B. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Sanrobone kabupaten Takalar. Pemilihan kecamatan Sanrobone kabupaten Takalar sebagai lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan pertama adalah adanya karakteristik khusus yang melekat pada keadaan yang dipilih. Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa kecamatan Sanrobone merupakan bekas kerajaan sehingga terdapat kebudayaan yang masih melekat dalam masyarakat, di mana kebudayaan inilah yang membuat lahirnya sebuah lembaga adat di kalangan masyarakat kecamatan Sanrobone, atas dasar tersebut lokasi penelitian ini kemudian dipilih.

Alasan lain yang tidak kalah pentingnya dan pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini, pertimbangan tersebut ialah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu. Pelaksanaan penelitian di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan kemampuan tenaga peneliti, itu dikarenakan lokasi penelitian merupakan daerah atau kampung kelahiran dari peneliti itu sendiri.

1. Peta Kecamatan Sanrobone



Gambar 4.1 Peta Lokasi Kecamatan Sanrobone

2. Sejarah Kecamatan Sanrobone

Kecamatan Sanrobone sebelum berdirinya NKRI merupakan wilayah kerajaan, kecamatan Sanrobone yang letaknya sekitar 12 km dari pusat pemerintahan kabupaten Takalar ini ialah pecahan dari kecamatan Mappakkasunggu. Sejak pemerintahan bupati Takalar Dr. H. Ibrahim Rewa, MM. maka Sanrobone dimekarkan sebagai kecamatan dengan beberapa pertimbangan, pertimbangan yang paling mendasar yakni Sanrobone mempunyai historis yang begitu besar dan mempunyai potensi sebagai daerah tujuan wisata. Sekarang kecamatan Sanrobone

3. Letak Geografis Penelitian

Kecamatan Sanrobone adalah kecamatan yang membawahi 6 desa dengan kategori desa pantai sebanyak 2 desa dan desa bukan pantai sebanyak 4 desa. Batas-Batas Kecamatan Sanrobone antara lain:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Galesong Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

4. Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa dan Usia. Jumlah Penduduk kecamatan Sanrobone pada tahun 2014 sekitar 13.543 jiwa, yang terdiri dari 6.362 laki-laki dan 7.181 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut, Desa Banyuanyara adalah yang terbesar jumlah penduduknya sekitar 2.856 jiwa dan desa yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Desa Laguruda sekitar 1.458 jiwa. Kepadatan penduduk Kecamatan Sanrobone dalam kurun waktu 2013 hingga 2014, nampak mengalami peningkatan, dari 457 jiwa/km² tahun 2013 menjadi 461 jiwa/km², di tahun 2014. Jika dilihat perdesa, tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di desa Ujung Baji, yakni sekitar 647 jiwa/km², diikuti desa Tonasa sekitar 695 jiwa/km². Sedangkan desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah desa Laguruda yakni sekitar 318 jiwa/km². Penduduk usia produktif yakni kelompok umur 15 sampai dengan 64 tahun, Kecamatan Sanrobone mengalami

peningkatan, dari 64,36 persen di tahun 2013 menjadi 64,74 persen di tahun 2014. Sebaliknya usia tidak produktif yakni kelompok 0-14 tahun dan 65+ tahun mengalami penurunan dari 35,63 persen di tahun 2013 menjadi 35,26 persen di tahun 2014. (Statistik Daerah Kecamatan Sanrobone dalam Angka 2015).

Tabel 4.4 Jumlah Warga Kecamatan Sanrobone Setiap Desa

Desa/Kelurahan	Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Rumah Tangga
Laguruda	1.482	4.59	323,09	321
Sanrobone	2.683	6.32	424.53	541
Banyuanyara	2.868	7.93	361.66	674
Paddinging	1.854	3.37	550.15	481
Ujung Baji	2.180	3.31	658.61	500
Tonasa	2.797	3.84	728.39	562
Jumlah	13.865	29.36	472.24	3.079

5. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

a. Pendidikan

Salah satu faktor untuk kemajuan pendidikan adalah melalui penyediaan sarana dan prasarana yakni adanya peningkatan jumlah sekolah dan jumlah pengajar. Jumlah Sekolah Dasar (SD) Sederajat sebanyak 17

buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat sebanyak 3 buah, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat sebanyak 2 buah. Jumlah murid SD yang menikmati pendidikan di sekolah di tahun 2013 di Sanrobone sebanyak 1.813 murid. jumlah siswa SLTP sebanyak 637 siswa, dan jumlah siswa SLTA sebanyak 739 siswa. Pada jenjang pendidikan SD di Kecamatan Sanrobone, seorang guru rata-rata mengajar 14 murid, jenjang pendidikan SLTP, seorang guru rata-rata mengajar 10 siswa. Sedang pada jenjang pendidikan SLTA, seorang guru rata-rata mengajar 13 siswa. (Statistik Daerah Kecamatan Sanrobone dalam Angka 2015).

b. Kesehatan

Dari 6 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Sanrobone, belum semua desa/kelurahan memiliki sarana puskesmas dan puskesmas pembantu, Poskesdes/Polindes seperti desa Ujung Baji dan Desa Tonasa. Jika dilihat tenaga kesehatan, jumlah perawat dari 4 orang di tahun 2015, sama 5 orang di tahun 2016. Untuk bidan desa, dari 10 orang di tahun 2015 tidak mengalami perubahan 10 orang di tahun 2016. Dari Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Sanrobone sebesar 2.654 orang yang sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) sekitar 72,85 persen, sedangkan yang belum ber KB sekitar 27,15 persen. Adapun desa/kelurahan yang paling banyak peserta KB nya adalah Desa Banyuanyara sekitar 365 orang, diikuti Desa Ujung Baji sekitar 340 orang.

Sedangkan desa yang paling sedikit adalah Desa Laguruda sekitar 230 orang.

6. Potensi Kecamatan Sanrobone

a. Pertanian

Tanaman pangan yang ada di Kecamatan Sanrobone antara lain padi, jagung dan kacang hijau, dengan nilai produksi sebesar 515,32 ton untuk tanaman padi sawah, jagung sebesar 521,97 ton. Sedangkan kacang hijau sebesar 5,5 ton. Salah satu andalan sektor pertanian di kecamatan ini adalah sub sektor perikanan karena tiap tahunnya nilai produksi dari sub sektor ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat bahwa untuk perikanan laut meningkat dari 346 ton di tahun 2015 menjadi 349 ton di tahun 2016. Demikian pula perikanan darat juga mengalami kenaikan dari 191 ton di tahun 2015 menjadi 194 ton di tahun 2016. Kemudian, ternak yang ada di Kecamatan Sanrobone terdiri dari sapi, kerbau, kambing dan unggas.

Dari jumlah ternak tersebut yang mengalami perkembangan adalah ternak sapi dari 254 ekor di tahun 2014 menjadi 409 ekor di tahun 2016. Sedangkan untuk ternak yang lainnya mengalami penurunan, seperti ternak kambing misalnya dari 1.202 ekor di tahun 2015 turun menjadi 951 ekor di tahun 2016. Untuk unggas juga mengalami penurunan, ayam buras dari 33.218 ekor di tahun 2015 menjadi 27.105 ekor di tahun 2016. Lahan sawah di Kecamatan Sanrobone jika dilihat dari jenis pengairannya, yang

sudah berpengairan teknis sekitar 525,97 ha, sedangkan masih tadah hujan sekitar 403,78 ha di tahun 2015. (Statistik Daerah Kecamatan Sanrobone dalam Angka 2017)

b. Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama dalam menunjang suatu perekonomian suatu daerah. Industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok yaitu industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Dari 102 perusahaan industri pengolahan di Kecamatan Sanrobone di tahun 2016, yang terbanyak adalah industri rumah tangga yakni sekitar 101 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 206 orang, dan industri kecil sebanyak 1 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 15 orang. Dari sekian banyak perusahaan industri rumah tangga, paling banyak terdapat di Desa Ujung Baji dengan jumlah 30 perusahaan, Desa Sanrobone sebanyak 21 perusahaan, Desa Tonasa sebanyak 18 perusahaan, Untuk industri kecil hanya terdapat di Desa Banyuanyara.

c. Perdagangan dan Koperasi

Di Kecamatan Sanrobone belum mempunyai pasar. Hanya terdapat Toko, Kios/Kedai dan warung makan. Umumnya toko hanya terdapat di Desa Paddinging. Jumlah toko, Kios/Kedai mengalami perubahan dari tahun 2014 – 2015 yakni masing-masing 1 buah dan ,kios/kedai sebanyak 217 buah, yang sebelumnya 202 buah di tahun 2014. Tiap semua desa . Kios terbanyak terdapat di Desa Banyuanyara sekitar 53 kios, Desa Ujung

Baji sekitar 50 kios. Dan desa Sanrobone sekitar 40 kios jumlah yang hampir sama yaitu Desa Laguruda, dan Desa Paddinging yaitu sekitar 24 kios untuk desa Laguruda dan 20 untuk desa Paddinging. Untuk lembaga koperasi di Kecamatan Sanrobone tahun 2014 sebanyak 12 buah, dengan rincian koperasi unit desa (KUD) sebanyak 1 buah dengan jumlah anggota sebanyak 1.985 orang dan Non KUD Sebanyak 11 buah dengan jumlah anggota sebanyak 669 orang.

C. Ikon Atau Tempat Terpopuler Di Sanrobone

Sebuah tempat atau sebuah wilayah memiliki daya tarik bagi masyarakatnya sendiri yang ada di wilayah tersebut maupun masyarakat dari luar, tempat-tempat terpopuler itu ada berbagai macam tergantung dari historis dan letak wilayah, seperti halnya yang ada di sanrobone ini yang dikenal sebagai wilayah kerajaan dimasa lalu tentunya mempunyai historis yang begitu menarik untuk dijelajahi. Maka dari itu peneliti akan mengenalkan tempat – tempat atau peninggalan kebudayaan pada masa kerajaan Sanrobone.

1. Benteng Sanrobone

Tumpukan batu bata merah membentuk dinding tebal selebar empat meter dan setinggi enam meter. Batuan rapuh berlumut tak terawat itu melintang sepanjang 20 meter saja, namun usianya jauh lebih tua dari negara Indonesia. Benteng Sanrobone, itulah namanya. Berdirinya pada abad XV dari buah tangan Raja Sanrobone I, Karaeng Dampang Panca Belong.

Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1515 atas perintah Raja Gowa Tumapa'risi Kallonna dan rampung pada tahun 1520. Terletak di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar Sulsel, sekitar 80 kilometer dari Makassar. Benteng ini dulunya seluas 25.54 Ha dengan ukuran sisi barat sepanjang 573 m, sisi selatan 529 m, sisi timur 748 m dan sisi utara 332 m. Benteng ini terbuat dari batu bata dan berbentuk perahu dengan panjang sekitar 3,7 km dan mempunyai 7 pintu yaitu 4 pintu besar searah dengan mata angin dan 3 pintu kecil. Sisa-sisa benteng yang ada pun hanya sekilas tampak seperti tembok lebar berbatu bata merah biasa dengan hiasan dua meriam panjang seberat 150 kg yang kini berkarat tak terpelihara. Selebihnya hanya tanah lapang luas dengan papan bertuliskan "Kawasan Ini Dilindungi Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala".

Benteng ini runtuh bersama dengan benteng somba opu dan beberapa benteng lain yang diratakan dengan tanah oleh Cornelis Speelman, Jenderal pasukan VOC pada perang Makassar (Oktober 1666-12 Juni 1669). Total di wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo ada 14 benteng. Kini hanya tersisa satu benteng yang masih utuh yakni Benteng Pannyua atau Fort Rotterdam. Kompleks Benteng Sanrobone semakin hancur pada masa pemberontakan DI/TII. Istana kerajaan dibakar pada tahun 1956 oleh pemberontak lantaran Raja Sanrobone ke 23 (raja terakhir 1950-1956), Mallombasi Daeng Kilo, memihak ke negara kesatuan Republik Indonesia akibatnya semua catatan

sejarah tentang Sanrobone dan barang kerajaan ludes tak bersisa. Yang tersisa hanya tungku besar terbuat dari batu bata merah untuk membuat roti dan tiang pemancang yang digunakan sebagai penanda upacara pengangkatan Raja Sanrobone.

2. Makam Raja-Raja Sanrobone

Terdapat kompleks pemakaman tua milik raja dan keturunannya seluas 60 x 44 meter persegi. Setidaknya ada 44 nisan penuh lumut dengan pahatan tak jelas hampir terhapus berserakan di sebidang tanah penuh ilalang. Yang paling menarik perhatian adalah dua nisan berkubah runcing setinggi lima meter bercat putih kusam dengan hiasan kubah. Dua nisan itu bertuliskan kaligrafi Arab gundul dengan pola hias sulur-suluran dan tumbuh-tumbuhan. Makam berkubah itu pernah dipugar ulang karena bagian atapnya runtuh akibat dimakan usia. "Sang penghuni nisan adalah raja ke-14, Karaengta Kalukuang dan Karaeng Timinanga Ri Masigeria bergelar Tuminanga Ri Agurana, ulama penyebar Islam di Sanrobone," ucap Daeng Nompo. Sekilas, makam berkubah Sanrobone tampak sama bentuknya dengan makam berkubah di kompleks pemakaman raja-raja Gowa di Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Kesamaan ini konon menunjukkan Kerajaan Gowa, Tallo, dan Sanrobone termasuk kerajaan kembar.

3. Maudu Adaka' Ri Sanrobone

Maudu' Adaka' Ri Sanrobone atau Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang diperingati setiap tahunnya merupakan sudah menjadi agenda penting. Maulid yang dilaksanakan ini berbeda dengan maulid-maulid lainnya, dalam pegelaran maulid ini seluruh warga berpartisipasi untuk meramaikannya, mulai dari mempersiapkan kado' minyak, telur yang telah diwarnai, buah-buahan, wadah yang telah dihias berbagai macam bentuk, serta lain-lainnya. Pada pelaksanaan Maudu'Adaka Ri Sanrobone ini dihadiri dari berbagai kalangan, seperti pemerintah, para raja seperti karaeng Galesong dan karaeng Polongbangkeng, serta para pengunjung dari luar Sanrobone yang dengan sengaja datang menghadiri perayaan maulid tersebut.

BAB V

PERAN LEMBAGA ADAT SANROBONE DALAM

MEMPERTAHANKAN BUDAYA

A. Hasil Penelitian

1. Lembaga Sosial

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat norma yang berfungsi mengatur perilaku anggota-anggotanya. Proses terbentuknya norma itu sendiri berawal dari sejumlah nilai-nilai yang terinternalisasi dalam perilaku warganya. Proses ini melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu lama. Norma-norma tersebut kemudian membentuk sistem norma yang kita kenal sebagai pranata sosial. Proses sejumlah norma menjadi pranata sosial disebut pelebagaan atau institusionalisasi. Oleh karena itu, pranata sosial sering disebut sebagai lembaga sosial. Lembaga sosial berkaitan dengan seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan saling memengaruhi; seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup; seperangkat norma yang mengatur hubungan antarwarga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Kemudian lembaga sosial memiliki ciri-ciri antara lain adanya tujuan, dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tertulis atau tidak tertulis, diambil dari nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, adanya prasarana seperti bangunan dan lambang tertentu. Di

dalam lembaga sosial akan ditemukan unsur budaya dan unsur struktural, yaitu berupa norma dan peranan sosial. Lembaga sosial dapat dikatakan sebagai suatu adat kebiasaan dalam kehidupan bersama yang mempunyai sanksi yang sistematis dan dibentuk oleh kewibawaan masyarakat.

2. Peran

Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan. Setiap orang tentu memiliki peran masing-masing dalam suatu keadaan. Misalnya seorang Polisi lalu lintas (Polantas) memiliki peran menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas agar pengguna jalan tetap merasa aman dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makna peran sendiri dapat dijalankan lewat beberapa cara yaitu :

- a. Penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.
- b. Penjelasan peran yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yaitu peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.
- c. Penjelasan yang lebih operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan.

Dalam kajian mengenai mempertahankan budaya, maka fokus pemikiran kita tertuju kepada masyarakat, dari masyarakat lahiriah segolongan kelompok dalam bentuk lembaga adat, lembaga adat disuatu wilayah adat tertentu mempunyai peran begitu penting dalam mempertahankan adat atau budayanya. Sanrobone sebagai bekas daerah kerajaan maka tidak bisa dipungkiri kalau terdapat ragam kebudayaan atau tradisi-tradisi peninggalan kerajaan dimasa lalu. Maka dengan demikian untuk mempertahankan kebudayaan-kebudayaan tersebut dibentuklah sebuah lembaga adat. Lembaga adat yang ada di Sanrobone ini kita ingin melihat sejauh mana perannya dalam mempertahankan budaya yang ada di Sanrobone.

Selain itu peran masyarakat pula sangat membantu dalam kelestarian budaya yang ada di Sanrobone, setiap dewan lembaga adat melaksanakan suatu kegiatan kebudayaan atautkah tradisi maka masyarakat ikut terlibat didalamnya, kerja sama antara dewan lembaga adat dan masyarakat ini menandakan sifat kegotong-royongan yang melekat pada masyarakat Sanrobone ini tidak lain merupakan warisan moral para pendahulunya yang dikenal dalam istilah Makassar, *sipappaccei*, *sipassiriki*, dan *sipammaling-malingi*. Kemudian dari itu tak lupa pula peneliti mendeksripsikan peran pemerintah dalam melestarikan kebudayaan, tanpa adanya peran pemerintah maka setiap kegiatan kebudayaan tidak akan berjalan maksimal. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama yakni Lembaga Adat Sanrobone,

kita ingin mengetahui sejauh mana peran dan fungsinya selama ini dalam melestarikan budaya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden Bapak H. Abdul Latif Saleh Daeng Gassing (65) selaku sekretaris dewan pemangku adat Sanrobone mengungkapkan bahwa :

Versi Bahasa Indonesia :

“Kalau kita ingin mencari bagaimana caranya agar masyarakat bisa menjaga kebudayaan yang ada disanrobone? Yakni sering memberikan pencerahan-pencerahan atau mengadakan acara kebesaran, kalau kita mendirikan satu acara kami mengundang seluruh masyarakat untuk hadir, supaya mereka tahu maksud dari acara tersebut, jadi disanalah kita menyampaikan ke masyarakat”. (Wawancara, 26 Agustus 2017)

Versi Bahasa Makassar :

“(Punna niboya ante kamma carana sollanna anjo tumabuttayya akkullei najagai pangada'kangnga ri sanrobone? iyami antu sarroki ampakasingaraki iyareka anggaukangki se,re acara kalompoang. Punna appaentengki se're acara nibuntuli ngasengi sikamma tumabuttayya untuk hadere, sollanna niaki na isseng apa anjo maksudna acarayya, jari anjoengmi anjo nipappaissengang ri tumabuttayya)”. (wawancara, 26 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara peneliti diatas itu berarti menandakan peran lembaga adat dalam melestarikan kebudayaan yang ada di sanrobone yakni pada saat memperingati acara kebesaran, masyarakat turut hadir dilibatkan agar mereka bisa memahami tradisi-tradisi atau kebudayaan yang ada di sanrobone.

Kemudian peneliti mewawancarai responden lain, yakni seorang responden yang merupakan pemangku adat dari wilayah yang berbeda

tetapi sama-sama dalam lingkup Sanrobone, Bapak Muhammad Nur Daeng

Pasang (57) menyatakan bahwa :

Versi Bahasa Indonesia :

“Alhamdulillah sejauh ini budaya yang ada di Sanrobone tetap bertahan sebab kita selaku dewan adat selalu rajin mengingatkan masyarakat, biasanya kita mendatangi satu per satu rumah untuk memberi pencerahan agar selalu menjaga budaya yang ada. Masyarakat pun sadar dengan hal itu supaya budaya itu dilestarikan dan mengajarkan kepada anak-anaknya”.. (Wawancara, 26 Agustus 2017)

Versi Bahasa Makassar :

“(Alhamdulillah sanggenna kamma-kamma anne budaya niaka ri sanrobone teta’ki bertahan na saba I katte selaku dewan adatkan’ tuli rajinki ampakainga’ki tuma buttaya, biasanna ri mangae ta’ se’re-se’re balla untuk ampakasingarangi sollanna anne budayayya na jagai. Apaji masyarakat tuli nia tongi sadara untuk a’ lestarikangngi anne budaya na napappaissengang tong mange ri ana’ na)”. (Wawancara, 26 Agustus 2017)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan responden diatas, maka Lembaga Adat bukan cuman pada saat ada acara kebesaran hingga memberi pengenalan kepada masyarakat, namun dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Adat turun ke masyarakat menemui secara langsung dengan mendatangi ke tempat tinggalnya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu tokoh masyarakat untuk mendengarkan sejauh mana peran lembaga adat Sanrobone dimata masyarakat, Bapak Abdul Wahid Talli (50), mengatakan bahwa :

Versi Bahasa Indonesia :

“Peranan Lembaga Adat yang ada di Sanrobone selama ini baik caranya, mereka menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, dan sering turun ke satu per satu rumah, meski cuman pergi silaturahmi biasa tapi dia sambil mem berikan cerita-cerita sejarah dulu dan dia mengajar kita

bagaimana kelakuan-kelakuan yang baik pada agama bagus juga pada kebudayaan”.(Wawancara, 28 Agustus 2017)

Versi Bahasa Makassar :

“Peranan na lembaga ada’ ka ri Sanrobone salama anne baji’ji batena, na pajjappaji peran na fungsina masing-masing, siagang sarroi naung mange ri ta’ se’re-se’re balla, manna mangeja assilaturahmi biasa tapi nasare tommaki anjo carita-carita sejarahnya riolo siagang na ajaraki ante kamma gau-gau bajika, bajiki mange ri agamayya baji tongi mange ri pangadakkangnga”.(Wawancara 28 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat diatas, maka mencerminkan bahwa peran lembaga adat dalam melestarikan budaya yang ada di Sanrobone cukup optimal dalam menjalankan fungsi dan perannya karna mereka turun .

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui peran pemerintah setempat, apakah turut terlibat langsung dalam melestarikan budaya di Sanrobone! Maka mengenai hal ini peneliti mencoba mewawancarai pegawai UPTD kecamatan Sanrobone bagian Humas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Ibu Syamsiah, S.Pd, (45) dalam wawancara ini responden mengungkapkan bahwa

“Kita selaku pemerintah setempat turut mendukung dan langsung berperan aktif dalam menjaga kebudayaan yang ada di Sanrobone ini. Menjaga atau melestarikan kebudayaan itu sudah menjadi kewajiban bagi kami, ini guna untuk membangun masyarakat yang mempunyai adat istiadat yang baik dan tidak melupakan kebiasaan orang terdahulu yang kami anggap itu membawa kebaikan dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perda maupun perundang-undangan. Kemudian bukan cuman itu dengan lestarnya budaya ini maka ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar bahkan kita sering kedatangan tamu penting, seperti contohnya baru-baru ini kita kedatangan perdana menteri Malaysia yang merupakan keturunan dari raja gowa, ini membawa daya tarik tersendiri bagi Sanrobone khususnya dan secara tidak langsung ini mendorong perekonomian yang ada di Sanrobone ini”. (Wawancara, 28 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara peneliti diatas bersama Bapak H. Abdul Latif Saleh Daeng Gassing (65) selaku sekretaris dewan pemangku adat Sanrobone itu berarti menandakan peran lembaga adat dalam melestarikan kebudayaan yang ada di sanrobone yakni pada saat memperingati acara kebesaran, masyarakat turut hadir dilibatkan agar mereka bisa memahami tradisi-tradisi atau kebudayaan yang ada di sanrobone. Kemudian dari Bapak Muhammad Nur Daeng Pasang (57), maka Lembaga Adat bukan cuman pada saat ada acara kebesaran hingga memberi pengenalan kepada masyarakat, namun dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Adat turun ke masyarakat menemui secara langsung dengan mendatangi ke tempat tinggalnya. Kalau dari penuturan Bapak Abdul Wahid Talli (50) selaku tokoh masyarakat maka mencerminkan bahwa peran lembaga adat dalam melestarikan budaya yang ada di Sanrobone cukup optimal dalam menjalankan fungsi dan perannya karna mereka turun, dan dari pemerintah setempat sangat mendukung dan langsung berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan Sanrobone, selain itu responden mengungkapkan bahwa dengan adanya budaya ini maka Sanrobone biasanya banyak dikunjungi oleh masyarakat luar bahkan orang-orang penting yang membawa dampak yang baik masyarakat daerah, seperti dalam hal ekonomi.

B. Pembahasan

Sanrobone merupakan salah satu daerah yang terdapat dikabupaten Takalar mempunyai riwayat sejarah yang begitu penting dan mempunyai sarat makna. Pada masa kerajaan Gowa, Sanrobone termasuk bagian dari kerajaan kecil yang sangat berpengaruh, ini dapat dibuktikan dengan adanya bekas benteng yang dikatakan dalam bukti sejarah benteng ini didirikan tidak jauh hari bedanya dengan benteng somba opu yang kita kenal merupakan singgasana raja Gowa.

Oleh karna itu Sanrobone memiliki peninggalan-peninggalan kebudayaan, seperti Maudu' Adaka, Accera Kalompoang, Appassili, dan lainnya. Untuk menjaga tradisi atau kebudayaan maka diperlukan disini seseorang atau sekelompok orang yang benar-benar tahu tentang sejarah, maka dari itu terbentuklah Lembaga Adat. Setelah peneliti menyusuri lebih dalam Lembaga Adat yang ada di Sanrobone, maka dapat dituliskan bahwa cukup optimal dalam melestarika kebudayaan yang ada di sanrobone.

Seiring berjalannya waktu Lembaga Adat tetap konsisten dalam menjaga kebudayaan yang ada di Sanrobone dengan berbagai cara, ini guna agar kebudayaan yang ada selama ini tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin tinggi. Oleh karena itu maka pendekatan-pendekatan ke masyarakat semakin di tingkatkan. Pola perilaku manusia pada saat ini sangat gampang terpengaruh dari kebiasaan-kebiasaan modern yang bisa saja menggeser pola perilaku atau adat-istiadat yang ada sejak dulu.

Alasan dilestarikannya budaya ini karna Sanrobone dikenal dulunya sebagai wilayah kerajaan yang mempunyai banyak warisan leluhur. Maka yang perlu ditanamkan sekarang dalam pemikiran kita yakni sebuah kalimat “Bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan sejarahnya”. Kemudian selain itu adat-istiadat atau kebudayaan yang ada di Sanrobone menurut pandangan peneliti itu sangat baik dan tidak bertentangan dengan agama maupun perundang-undangan.

Lembaga Adat Sanrobone dalam keberadaannya sangat didukung oleh pemerintah setempat, karena ini sangat membantu tugas pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata yang ada di Sanrobone. Untuk kemajuan suatu daerah maka itu dapat dilihat dari daya tarik wisatanya atau ikon yang ada pada daerah tersebut, di sanrobone dengan adanya peninggalan sejarah seperti benteng itu merupakan daya tarik tersendiri dan dengan demikian ketika banyak pengunjung yang datang ke Sanrobone secara tidak langsung memberi pemasukan kepada daerah serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, seperti dalam penyediaan jasa transportasi, penyediaan jasa tempat tinggal, mini market yang menyediakan keperluan pengunjung dan sebagainya.

C. Keterkaitan Antara Teori Dengan Hasil Penelitian

1. Teori Struktur Fungsional

Pada bagian ini peneliti akan menuliskan keterkaitan antara teori yang

dipakai dengan hasil penelitian, seperti halnya teori Struktur Fungsional yang di ungkapkan oleh Ritzer (2009: 21), konsep utama dalam teori ini adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori ini masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan mempengaruhi akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, jika tidak fungsional maka struktur tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.

Lembaga adat yang erat kaitannya dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan masyarakat ialah diatur dalam adat istiadat, sehingga bimbingan yang paling banyak diterima oleh masyarakat adalah dalam lembaga adat. Lembaga adat yang merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan mempunyai fungsi pengawasan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi terhadap

anggota-anggotanya.

Sebagaimana para penganut teori struktural fungsional melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa sehat atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya (kelompok/individu fungsional) memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagiannya yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam, atau sakit. Demikian halnya juga dalam Lembaga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga yang saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Bahwa pada umumnya, Lembaga terdiri dari Ketua, wakil ketua dan anggota dimana masing-masing anggota tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar anggota.

Disamping fungsional, penulis juga mengajukan konsep disfungsi dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat bersifat negatif. Masih terhubung dengan contoh di atas, bahwa seorang ketua bisa disfungsi terhadap anggota-anggotanya. Dimana ketua tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan yang mengatur dan mengarahkan. Jika hal tersebut terjadi dalam suatu lembaga maka akan mengganggu sistem yang ada dalam lembaga, membuat fungsi lembaga mengalami pergeseran.

d. Struktur Kelembagaan dan Fungsi dalam Lembaga Adat Sanrobone

1) Karaeng (Ketua Adat)

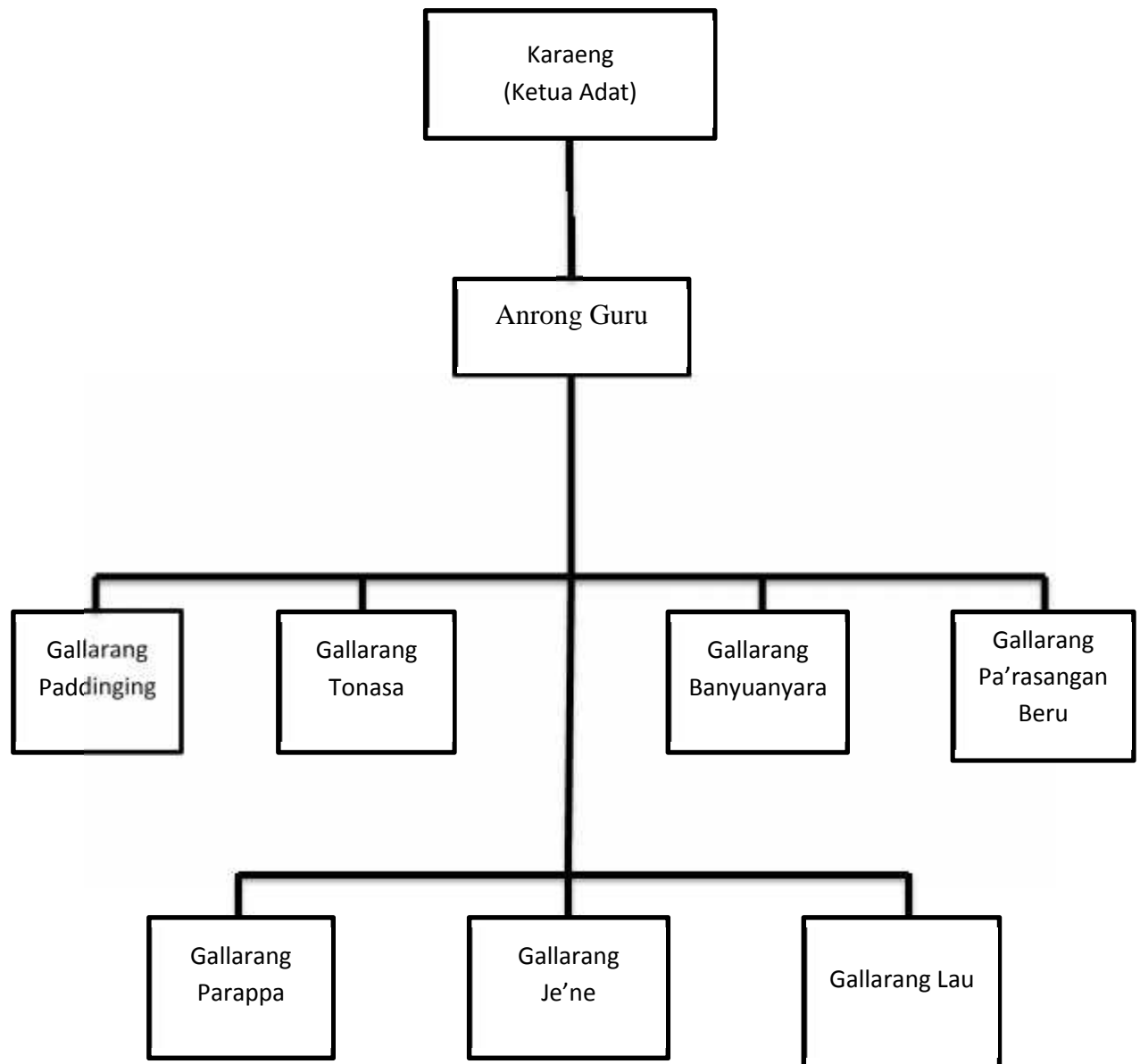
Karaeng disini ialah sebagai tokoh utama dalam lembaga ini, seorang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan terhadap kerajaan sanrobone, pengambilan keputusan ada pada tangan Karaeng (Ketua).

2) Anrong Guru

Secara struktur berada langsung dibawa karaeng atau kata lainnya sebagai asisten karaeng. Anrong Guru disini juga sering bertindak sebagai penasehat Karaeng.

3) Gallarang

Gallarang disini bertanggung setiap bekas wilayah kerajaan, adapun ada tujuh wilayah kecil bekas kerajaan, sekarang dalam bentuk desa, maka setiap anrong guru menaungi satu desa yang di amanahkannya.



Gambar 5.1 Struktur Lembaga Adat Sanrobone

BAB VI

KENDALA YANG DIHADAPI LEMBAGA ADAT SANROBONE

DALAM MEMPERTAHANKAN BUDAYA

B. Hasil Penelitian

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keorganisasian atau kelompok kita tidak bisa pungkiri pasti terjadi dinamika, tidak ada individu maupun kelompok dalam menjalankan suatu amanah atau pekerjaan yang terus berjalan dengan baik tanpa hambatan-hambatan. Masalah ataupun rintangan selalu menanti kapan saja, tergantung bagaimana kita menyikapinya, ada kalanya kita bersikap secara profesional kadang kala kita mengedepankan ego masing-masing. Lembaga Adat Sanrobone meski kita ketahui dalam menjalankan peran dan fungsinya cukup optimal, akan tetapi bukan berarti menandakan tidak ada masalah didalamnya. Factor internal dan factor eksternal bisa saja menjadi masalah dalam lembaga ini, apabila kita berbicara budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk system agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Faktor yang bisa menjadi kendala Lembaga Adat Sanrobone untuk melestarikan budaya yakni factor internal dan factor eksternal, pada jaman modern seperti ini budaya asli negara kita memang sudah mulai memudar, factor dari budaya luar memang sangat mempengaruhi budaya lokal.

Kemudian di dalam keanggotaan Lembaga Adat bisa saja terjadi gesekan-gesekan antara para anggota lembaga, seperti posisi dalam keanggotaan ataupun pengangkatan dewan lembaga adat. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi kendala Lembaga Adat Sanrobone selama ini maka peneliti menanyakan kepada beberapa responden.

Bapak Rasyid Daeng Ngunjung (69) salah seorang anggota pemangku ada' gallarrang pa'rasangan beru, beliau mengungkapkan bahwa :

Versi Bahasa Indonesia :

“Kalau yang ditunjuk menjadi seorang pemangku adat, yaitu harus memiliki syarat-syarat yakni harus mengetahui adat-istiadat terdahulu, bisa menjadi teladan bagi masyarakat, serta memiliki garis keturunan raja-raja dulu”.(Wawancara, 30 Agustus 2017)

Versi Bahasa Makassar :

“(punna anjo ni jojjo kah ajjari selaku anggota dewan pemangku ada' iamiantu niaka naballaki syara'-syara'na, iamiantu parallui na isseng ada'-ada' rioloa, akkullepi anjari conto' ri tuma buttayya, na nia tompa assala cera'na)”.(Wawancara, 30 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diatas, maka dapat diungkapkan bahwa yang ditunjuk atau diangkat menjadi seorang anggota lembaga adat tidak sembarang orang, Karena harus mempunyai kriteria tersendiri, seperti harus mempunyai garis keturunan dengan raja-raja terdahulu.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan responden sebelumnya dengan waktu yang sama yakni Bapak H. Abdul Latif Saleh Daeng Gassing, (65) beliau mengatakan :

Versi Bahasa Indonesia :

“Itu yang menjadi hambatan bagi kita selaku lembaga adat yaitu persoalan dananya, biasanya kita terkendala disitu. Sebab kita para anggota lembaga adat tidak bisa bergerak terlalu leluasa kalau tidak ada dana, biasanya dana pribadi yang dipakai kalau kita ingin mengadakan suatu acara kebesaran, ataukah kalau kita ingin turun langsung mendatangi masyarakat para anggota membutuhkan biaya transport”.(Wawancara, 26 Agustus 2017)

Versi Bahasa Makassar :

”(Anjo anjari hambatan rikatte selaku lembaga ada’ka iamiantu persoalan danayya, biasa terkandala anjoengki. Nasaba ikatte parangta anggota lembaga takkulleiki giyo terlalu leluasa punna tena dana, biasa dana pribadiji dipake punna eroki angadakang se’re acara, iyareka punna eroki naung ri tuma buttayya nasaba anjo anggotayya kamase harus tongi nia biaya transporna)”.(Wawancara, 26 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti bisa menyimak bahwa yang menjadi masalah atau hambatan bagi lembaga adat sanrobone yakni persoalan pendanaan, dana menurut peneliti sangat begitu menunjang dalam keberlangsungan tugas para anggota lembaga adat, aka dengan demikian ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya peneliti mewawancarai kembali anggota lembaga adat yang posisinya sebagai gallarrang Paddinging, beliau bernama Bapak Ma,ruf Pangewa (55), mengatakan :

Versi Bahasa Indonesia :

“(Kalau persoalan posisi memang pernah terjadi yaitu ada dua dewan pemangku adat masing-masing mau menjadi ketua ataukah karaeng, tapi kalau hal ini tidak usah saya jelaskan secara rinci siapa namanya dan siapa orangnya, sebab sudah lewat dan rahasia bagi para kami anggota, kalau persoalan lain yakni palingan persoalan kecil tapi tidak bisa saya juga jelaskan secara rinci jadi saya mohon maaf”. (Wawancara, 30 Agustus 2017)”).

Berdasarkan penuturan diatas, maka peneliti dapat mendeksprisikan kalau lembaga adat sanrobone juga pernah terjadi persoalan internal yang bisa menghambat kinerjanya, yakni persoalan posisi ketua dimana dua orang anggota lembaga adat memperebutkan posisi ketua. Akan tetapi Bapak Ma'ruf Pangewa tidak ingin terlalu terbuka tentang persoalan ini dan sebagai peneliti pun mengerti hal itu.

Kemudian peneliti mencoba mewawancari seorang responden dari kalangan anak muda, Syahrul Sultan Nojeng (25), hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat dan minat anak muda sekarang tentang kebudayaan yang ada di sanrobone. Maka penuturan seorang tokoh pemuda yang sehariannya sebagai seorang guru muda disalah satu sekolah yakni mengungkapkan bahwa :

“Menurut pandangan saya sendiri, melestarikan kebudayaan yang ada di sanrobone ini merupakan hal penting karna ini merupakan identitas tersendiri bagi masyarakat sanrobone. Selaku orang sanrobone tentunya saya sangat menjaga kebudayaan yang ada, bahkan saya selalu mengajak kepada teman-teman atau siswa-siswa disekolah agar sadar dengan hal ini. Contoh sadarnya kalangan anak muda mengenai kebudayaan ini yakni dibentuk lembaga adat bergerak dibidang seni yang ada di Dengkang, disana bagi para pemuda atau siapa saja yang berminat mempelajari pakarena atau gendang Makassar disana siap mengajarkannya “. (Wawancara, 2 September 2017).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dikatakan kalau para pemuda yang berada di Sanrobone pada khususnya, dalam pelestarian kebudayaan mereka cukup memperhatikannya. Sebagai seorang pemuda yang mempunyai jiwa seni yang tinggi maka dia turut aktif dalam pelestarian

kebudayaan dibidang seni, yakni belajar memainkan gendang yang sering mengiringi acara-acara kebesaran.

C. Pembahasan

Mengenai faktor yang menghambat Lembaga Adat Sanrobone dalam melestarikan kebudayaan itu dipengaruhi oleh dari luar maupun dari dalam. Lembaga Adat dalam melestarikan budaya tidak seterusnya berjalan lancar, pasti terjadi hambatan-hambatan seperti halnya lembaga adat Sanrobone yang pernah mengalami masalah. Masalah yang pernah dihadapi yakni persoalan perebutan kursi ketua, hal ini secara tidak langsung mengganggu berjalannya fungsi dan peran lembaga. Kemudian seiring berjalannya waktu maka tidak bisa dipungkiri kalau pengaruh kebudayaan dari luar tidak bisa terbandung, yang bisa saja menggeser kearifan lokal atau kebudayaan yang sudah ada di Sanrobone, maka yang perlu jadi perhatian disini yakni generasi penerus, apabila generasi penerus atau generasi muda yang sudah ditanamkan akan cinta budaya sendiri maka sudah bisa terjamin kebudayaan yang ada akan tetap ada sampai di masa yang akan mendatang.

Nilai budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat memiliki kekayaan yang begitu besar nilainya, akan tetapi seiring perkembangan zaman upaya pelestariannya pun mulai luntur yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal masyarakat itu sendiri. Pelestarian adalah suatu proses atau tehnik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu

sendiri. Kelestarian tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu harus dikembangkan pula. Melestarikan suatu kebudayaan pun dengan cara mendalami atau paling tidak mengetahui tentang budaya itu sendiri. Mempertahankan nilai budaya, salah satunya dengan mengembangkan seni budaya tersebut disertai dengan keadaan yang kita alami sekarang ini. Yang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai budayanya.

Sebagai masyarakat Sanrobone ,maka wajib melestarikan budaya-budayanya sendiri agar tidak luntur atau hilang. Contohnya seperti maudu' lompoa, accera kalompoang, appalili,dan sebagainya. Karena budaya yang dimiliki dapat mencerminkan kepribadian daerahnya sendiri. Walaupun di Indonesia ini pada umumnya memiliki berbagai macam suku dan adat tetapi tetap saja itu semua merupakan satu bagian dari kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Upaya melestarikan budaya antara lain. paling tidak kita mengetahui tentang budaya jaman dahulu didaerah kita sendiri, kemudian mendalami kebudayaan itu. Setelah itu kita wajib memperkenalkan kepada orang lain atau yang belum tahu tentang kebudayaan tersebut. Membiasakan hal-hal atau kegiatan yang dapat melestarikan budaya seperti menabuh gendang atau bahkan mempelajarinya, karena pelestarian bisa terjadi karena kita telah terbiasa dengan kebudayaan tersebut. Kebudayaan Lokal Sanrobone adalah semua budaya yang terdapat di Sanrobone yaitu segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang bernilai di Sulawesi selatan ini maupun seluruh kepulauan indonesia, yang

ada sejak lama. Peranan budaya lokal ini mempunyai peranan yang penting dalam memperkuat ketahanan budaya Sanrobone, oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk bergerak lebih aktif melakukan pengelolaan kekayaan budaya, karena budaya tumbuh dan kembang pada ranah masyarakat pendukungnya. Disamping itu, bagi pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat sendiri, dan elemen lainnya haruslah menyokong atas keberlangsungan dalam pengelolaan kekayaan budaya kedepan. Kegiatan melaksanakan pengelolaan kebudayaan meliputi perlindungan; merawat, memelihara aset budaya agar tidak punah dan rusak disebabkan oleh manusia dan alam.

Pengembangan melaksanakan penelitian, kajian laporan, pendalaman teori kebudayaan dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam penelitian, pemanfaatan, melaksanakan kegiatan pengemasan produk, bimbingan dan penyuluhan, kegiatan festival dan penyebaran informasi, pendokumentasian. Pengelolaan kekayaan budaya sebetulnya merupakan cara kita bagaimana budaya itu bisa kita pahami, kita lindungi dan lestarikan agar dapat memperkuat ketahanan budaya bangsa. Hal ini terkait dengan citra, harkat, dan martabat daerah. Ketika pengelolaan kekayaan budaya dikelola dengan baik, maka akan muncul suatu keterjaminan, kelestarian dan Kekokohan akan budaya.

D. Keterkaitan Antara Teori Dengan Hasil Penelitian

Keterkaitan antara teori dengan hasil penelitian yakni teori konflik, konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan konflik. Ada empat fungsi dari konflik sebagai berikut: Sebagai alat untuk memelihara solidaritas, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain, mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi, dan fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengakui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat. Misalnya dalam sebuah lembaga terjadi konflik atau pertentangan antara sesama anggota, (kemudian di luar lingkungan keluarganya mereka memiliki musuh yang sama. Maka mereka terintegrasi dalam melawan musuhnya tersebut dengan mengabaikan konflik internal antara mereka.

Teori Interaksionis Simbolik, interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, melainkan didasarkan pada “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antara individu diantarai oleh penggunaan simbol-

simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam interaksionisme simbolik bahwa dalam proses interaksi individu dimulai dari suatu proses stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon oleh si aktor. Tetapi antara stimulus dan respon atau tanggapan diantarai oleh proses interpretasi. Proses interpretasi adalah proses berpikir yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki manusia.

Secara sederhana dapat digambarkan suatu proses interaksi yang terjadi dalam kelompok yang dimulai dengan adanya proses stimulus kemudian respon atau tanggapan. Dalam masyarakat dikenal simbol komunikasi. Simbol komunikasi merupakan proses dua arah di mana kedua pihak saling memberikan makna atau arti terhadap simbol-simbol itu. Dengan mempelajari simbol-simbol tersebut berarti manusia belajar melakukan tindakan secara bertahap. Dalam lembaga adat juga dikenal simbol komunikasi, sehingga antara anggota lembaga adat saling memahami dan mengerti tindakan anggota lainnya.

Contoh seorang karaeng memerintahkan atanya(bawahan) untuk mengambilkan perlengkapan perang di dalam istana. Ata tersebut mendengarkan perintah Karaeng dan melaksanakan perintahnya dengan mengambilkan perlengkapan tersebut. Ini artinya Kareng memberikan stimulus kemudian secara tidak langsung Ata menerima stimulus itu dan selanjutnya memberikan tanggapan atau respon atas stimulus dari Karaeng.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Peran Lembaga Adat Sanrobone Dalam Mempertahankan Kelestarian Budaya menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanrobone merupakan bekas wilayah kerajaan dibawah naungan kerajaan besar yaitu kerajan gowa, sebagai wilayah kerajaan di Sanrobone terdapat beberapa peninggalan budaya. Maka dengan ini keberadaan Lembaga Adat Sanrobone sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya, berbagai cara dilakukan lembaga adat dalam menjaga eksistensi kebudayaan yang ada di Sanrobone seperti acara tahunan yakni peringatan acara mauled Nabi Muhammad SAW yang biasa disebut *Maudu' Adaka' ri Sanrobone, accera kalompoang, appasili*, dan Sebagainya. Dalam acara tersebut masyarakat turut dilibatkan guna untuk mendekatkan kepada kebudayaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu.
2. Lembaga Adat Sanrobone terdiri dari orang-orang yang telah dipercayakan dan tidak sembarang mengangkat seseorang sebagai dewan adat, ada beberapa kriteria tertentu yang harus dimiliki untuk bisa menjadi bagian dari pemangku adat, yakni harus banyak mengetahui tentang

sejarah kerajaan serta kebiasaan yang dilakukan orang terdahulu atau didalam lingkup kerajaan, kemudian bisa menjadi amanah bagi masyarakat, dan harus ada ikatan dari raja-raja sebelumnya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah setempat agar kiranya betul-betul memperhatikan budaya atau peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Sanrobone, seperti perawatan Benteng Sanrobone sebagai bukti kuat bahwasanya Sanrobone merupakan bekas wilayah kerajaan. Kemudian agar kiranya mengalokasikan dana khusus kepada lembaga adat, supaya kinerja dari lembaga tersebut dapat berjalan optimal beserta para anggota lembaga merasa diberi perhatian karena inilah yang menjadi benteng utama dalam melestarikan kebudayaan.
2. Untuk para anggota lembaga adat, agar kiranya bisa lebih terbuka tentang persoalan yang terjadi dalam kelembagaan. Kepada masyarakat Sanrobone sendiri agar bisa tetap membantu peran lembaga adat dalam memperhatikan kelestarian budaya yang ada di Sanrobone, khususnya bagi para kaum muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Geertz, Clifford. 1992a. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius Press.
- Geertz, Clifford, 1992b. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius Press.
- Hakam A, Kama H. 2009. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Ihromi. 1996. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integritas Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Karmadi Dono, Agus. 1999. *Budaya Lokal Sebagai Warisan dan Upaya Pelestariannya*. Semarang: Jawa Pos.
- Rahmat Abdul, Fathoi. 2005. *Antropologi Sosial Budaya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ritzer George. 2012. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sulasman, Gumilar Setia. 2013. *Teori Kebudayaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto Soerjono, Budi Sulistyowati. 2006. *Sosiologi Pengantar*. Jakarta: Rajawali

Sujud Purnawan Jati. Slamet. 2005. *Pelaporan Dan Penanganan Temuan Benda Cagar Budaya*. Sejarah.

Suprpta, Blasius. 1996. *Pelestarian Benda Cagar Budaya*. Sejarah.

Setiadi, Elly M, dkk. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.

Soegiyini. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Widyosiswo. Hadi Eko. 1992. *Ilmu Budaya Dasar*. Planta. Ghali Indonesia.

Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Planta. Soerjono

Sumber Internet:

<http://kebudayaan.kemendikbud.go.id>

<http://takalar.bps.go.id>